

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini Penulis akan memaparkan secara detail terkait pendahuluan pada Tugas Akhir yang berisi tentang Latar Belakang penulisan, Ruang Lingkup, serta Tujuan dalam Penulisan Tugas Akhir. Berikut merupakan penjelasan dari pendahuluan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang”.

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memperkuat sistem perpajakan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pemungutan pajak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mardiasmo (2012:11) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD),

pajak daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sementara itu, pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.

Pemerintah Kabupaten Batang mengatur kebijakan terkait air tanah sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah. Pelaksanaan pajak air tanah dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang yang merupakan sebuah instansi untuk mengelola pajak air tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak air tanah dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berikut merupakan perbandingan Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Batang tahun 2020-2024 :

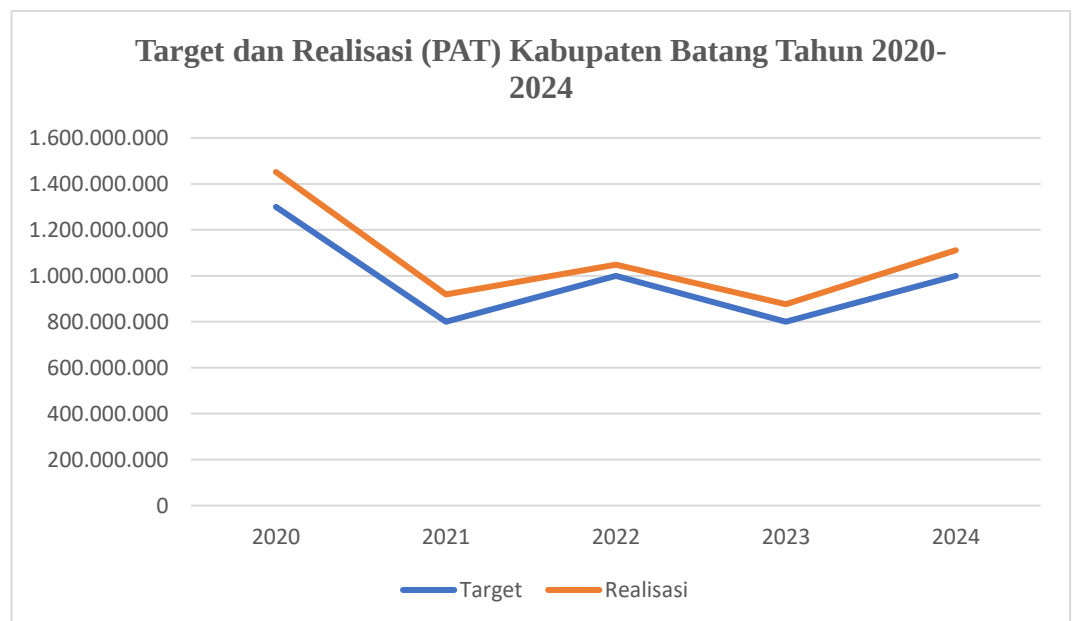
Tabel 1. 1 Ikhtisar Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Air Tanah (PAT) Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	1.300.000.000	1.451.931.000	111,69%
2021	800.000.000	918.524.100	114,82%
2022	1.000.000.000	1.048.152.200	104,82%
2023	800.000.000	876.288.100	109,54%
2024	1.000.000.000	1.111.102.260	111,11%

Sumber : BPKPAD Kabupaten Batang

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menunjukkan perbandingan target dan realisasi pajak air tanah Kabupaten Batang tahun 2020-2024. Target pajak berbeda untuk setiap tahunnya, dengan nilai paling tinggi sebesar Rp. 1.300.000.000 pada tahun 2020 dan nilai paling rendah sebesar Rp. 800.000.000 pada tahun 2021 dan tahun 2023. Sedangkan, penerimaan realisasi pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang selalu melebihi target yang sudah ditetapkan, yang berarti menunjukkan efektivitas dalam proses pemungutan pajak daerah untuk pemerintahan Kabupaten Batang.

**Tabel 1. 2 Grafik Target dan Realisasi Pajak Air Tanah (PAT)
Kabupaten Batang Tahun 2020-2024**



Grafik 1.1 merupakan grafik yang menunjukkan perbandingan antara Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Batang Tahun 2020-2024. Grafik berwarna menunjukkan pencapaian setiap tahun, di mana realisasi konsisten melebihi target sepanjang periode tersebut. Meskipun capaian ini

terlihat positif, halini juga dapat mencerminkan permasalahan dalam penetapan target yang kurang akurat.

Namun, meskipun target pajak berhasil terlampaui, terdapat fluktuasi dalam penetapan target tahunan yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan daerah, tingkat pemanfaatan air tanah oleh industri, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diperlukannya kajian lebih lanjut mengenai prosedur penagihan pajak air tanah yang diterapkan di Kabupaten Batang guna mengidentifikasi keunggulan dan potensi perbaikan dalam penggunaan sistem tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis sistem penagihan pajak air tanah di Kabupaten Batang. Dengan menggunakan data realisasi pajak air tanah dari tahun ke tahun, maka Penulis memilih judul Tugas Akhir **“Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang”**.

1.2 Ruang Lingkup

Pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam proses mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Di Kabupaten Batang, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakpatuhan Wajib Pajak, kurangnya sumber air tanah serta kendala dalam proses penagihan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya kajian mengenai prosedur penagihan pajak air tanah di Kabupaten Batang guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Dalam penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup dibatasi agar dapat berfokus terhadap analisis sistem penagihan pajak air tanah di Kabupaten Batang. Adapun ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian pajak air tanah.
2. Dasar hukum pajak air tanah.

3. Subjek dan objek pajak air tanah.
4. Prosedur perhitungan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
5. Prosedur penagihan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
6. Kendala dalam prosedur perhitungan dan penagihan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
7. Pengendalian internal dalam prosedur perhitungan dan penagihan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengevaluasi sistem penagihna pajak air tanah di Kabupaten Batang serta digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan tugas dan kegunaan penulisan Tugas Akhir :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup yang sudah dijelaskan diatas, berikut ini merupakan tujuan dari penulisan Tugas Akhir tentang Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah :

1. Menjelaskan pengertian pajak air tanah.
2. Mengidentifikasi dasar hukum pajak air tanah sebagai salah satu pendapatan daerah.
3. Mengidentifikasi subjek dan objek pajak air tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengkaji prosedur perhitungan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.

5. Mendeskripsikan prosedur penagihan pajak air tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pengeolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
6. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur perhitungan dan penagihan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.
7. Mengkaji pengendalian internal dalam prosedur perhitungan dan penagihan pajak air tanah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain yang memutuhkannya. Berikut ini adalah kegunaan penulisan dalam Tugas Akhir ini :

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah terkait administrasi perpajakan, khususnya dalam prosedur penagihan pajak air tanah. Penulisan ini digunakan sebagai penyelesaian Tugas Akhir guna menempuh kelulusan Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

2. Bagi Akademisi

Penulisan Tugas Akhir ini digunakan dalam membantu menambah informasi dan pengetahuan tentang pajak air tanah sekaligus sebagai referensi untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama.

3. Bagi Perusahaan

Dari penulisan Tugas Akhir ini maka dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan terkait pembahasan pajak air tanah.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tuags Akhir ini, pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan berbagai informassi yang akurat dan relevan mengenai prosedur penagihan pajak air tanah di Kabupaten Batang, berikut ini adalah cara pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir :

1.4.1 Data Penelitian Tugas Akhir

Pengumpula data ini sangat penting dalam penulisan Tugas Akhir. Terdapat 2 (dua) jenis data yang digunkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang peolehannya didapatkan secara langsung dari sumber asli melalui metode pengumpulan data secara langsung oleh para Penulis. Data primer dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, eksperimen dan lain-lain. Data primer sangat penting dalam penulisan Tugas Akhir ini karena dapat memberikan informasi terbaru yang akurat dan relevan dengan fokus kajian yang dilakukan. Data primer ini adalah data terkait proses perhitungan, penagihan dan pelaporan pajak air tanah di Kabupaten Batang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan daya yang perolehannya tidak didapatkan secara langsung. Data ini bisa didapatkan melalui sumber yang tersedia seperti laporan resmi, dokumen pemerintah,buku, jurnal maupun website yang telah tersedia. Data sekunder ini berupa struktur organisasi atau referensi lain yang dibutuhkan oleh Penulis.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir terkait prosedur penagihan pajak air tanah di Kabupaten Batang, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Hardani *et al.*, (2020) wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilkakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui metode ini, Penulis dapat memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabuapten Batang.

2. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung pada bagian Administrasi PAD terkait pendataan dan pengecekan meteran air tanah kepada wajib pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabuapten Batang.

3. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017) studi pustaka merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian pula akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada. Studi pustaka maka dikatakan bahwa studi pustaka

bisa mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber terkait prosedur penagihan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini bertujuan agar dapat memudahkan dalam proses penyusunan penulisan serta dapat memberikan gambaran secara singkat pada setiap bab. Berikut ini merupakan sistematika penulisan Tugas Akhir dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan mengenai latar belakang penelitian, judul dan penulisan Tugas Akhir yang didalamnya terdapat ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabuapten Batang. Pada bab ini akan memaparkan sejarah singkat berdirinya instansi, lokasi instansi, logo instansi, struktur organisasi instansi dan tugas masing-masing setiap bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabuapten Batang.
- BAB III : Terdapat dua bagian tinjauan teori dan tinjauan praktik. Tinjauan teori menguraikan tentang teori dari topik yang sedang dikaji, sedangkan pada tinjauan praktik menguraikan tentang objek penelitian dan pembahasan masalah yang diteliti pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabuapten Batang.
- BAB IV : Kesimpulan dan saran dari pembahasan Tugas Akhir mengenai prosedur penagihan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabuapten Batang.